

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Amiruddin dan H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2012.

Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta. PT.Raja Grafindo Persada. 2012.

C.ST Kansil. *Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah*. Aksara Baru. Jakarta. 1985.

C.ST. Kansil, Christine S.T Kansil. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Bumi Aksara. Jakarta. 2008.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta. 1989.

Marbun. *Hukum Administrasi Negara II*. FH UII Press. Jakarta. 2013.

Hardiyansyah. *Kualitas Pelayanan Publik*. Gava Media. Yogyakarta. 2011.

H.A.S. Moenir. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Bumi Aksara. Jakarta. 1992.

HAW. Widjaja. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2002.

Hayat. *Manajemen Pelayanan Publik*. PT Raja Grafindo Persada. Depok. 2017.

Hendra Karianga, *Carut Marut pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi Daerah*. Kencana. Depok. 2017.

H. Siswanto Sunarno. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta. 2012.

Inu Kencana S. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, PT Eresco. Jakarta. 1992.

Ismail Nurdin, *Etika Pemerintahan , Norma, konsep dan Praktek bagi penyelenggara pemerintah*, Lintang Rasi Aksara Books, Yogyakarta, 2017

Joeniarto. *Perkembangan Pemerintah Lokal*. BinaAksara. Jakarta. 1992.

Josef RiwuKaho. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2010.

Koswara E. *Teori Pemerintahan Daerah*. Institut Ilmu Pemerintahan. Press. Jakarta. 2001.

Lampiran Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003, tanggal 10 juli 2003 tentang *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik*.

Manullang. 2009. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Bumi Aksara. Jakarta. 2009.

Moenir. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Bumi Aksara. Jakarta. 2002.

Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. cet. ke-5. Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta. 1983.

Moh. Mahfud MD. *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. PT. RinekaCipta. Jakarta. 2001.

Moh. Nazir. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 2009.

Mudrajad Kuncoro. *Otonomidan Pembangunan Daerah (Reformasi, Perencanaan, Strategidan Peluang* Erlangga. Jakarta. 2004.

Ni' Matul Huda. *Hukum Tata Negara Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2011.

Rudy, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Bandar Lampung : Pusat Kajian Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan Fakultas Hukum Universitas Lampung. 2013.

Sampanan Lukman. *Manajemen Kualitas Pelayanan*. STIA LAN Press. Jakarta. 2000.

Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia (UI-Press). Jakarta. 2008.

Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2011.

Suharizal - Muslim Chaniago. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia setelah perubahan UUD 1945*. Thafa Media. Yogyakarta. 2017.

Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum : Filsafat, Teori dan Praktif*, Rajawali Pers, Depok, 2018

Tri Ratnawati, *Pemekaran Daerah : Politik Lokal & Beberapa Isu Terseleksi*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2009.

Wayan Wesna Astara dkk, *Legal Politics on touridm village of petang sub district in badung-bali*, Universitas Wamadewa, September, 2018

Zaidan Nawawi. *Manajemen Pemerintahan*. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta. 2013.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang- undang Dasar 1945;
- Undang- undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
- Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang- undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Pemekaran Daerah;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 Tentang Kecamatan;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 Tentang Pembentukan, Penghapusan, Dan Penggabungan Kelurahan;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2015 Tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan;
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor : 130 tahun 2018 tentang kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat;

- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 26 tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh;
- Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pembentukan, Penghapusan, Dan Penggabungan Kelurahan;
- Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 69 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok Fungsi dan Uraian Tugas Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh
- Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor : 130.14/313/WK-PYK/2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat di Kota Payakumbuh

